



2024

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

**# bangga
melayani
bangsa**

**# Ber
AKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
• Latar Belakang	3
• Tujuan Pelaporan Kinerja	4
• Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
• Rencana Strategis	5
• Indikator Kinerja Utama	6
• Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	11
• Kriteria Ukuran Keberhasilan	11
• Rencana Aksi	11
• Capaian Kinerja	17
❖ Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalitas Pegawai	29
❖ Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	29
❖ Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	32
• Realisasi Anggaran	32
• Faktor Pendukung Dan Penghambat Capaian Kinerja	33
• Rekomendasi Tindak Lanjut	34
BAB IV PENUTUP	
• Kesimpulan	35
• Saran	36

KATA PENGANTAR

Purwakarta, 31 Juli 2024

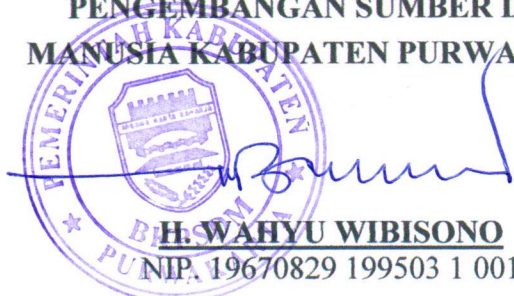
Assalammu'alaikum wr.wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat selesai tepat waktu. Laporan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penerbitan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**



H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta TW II tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

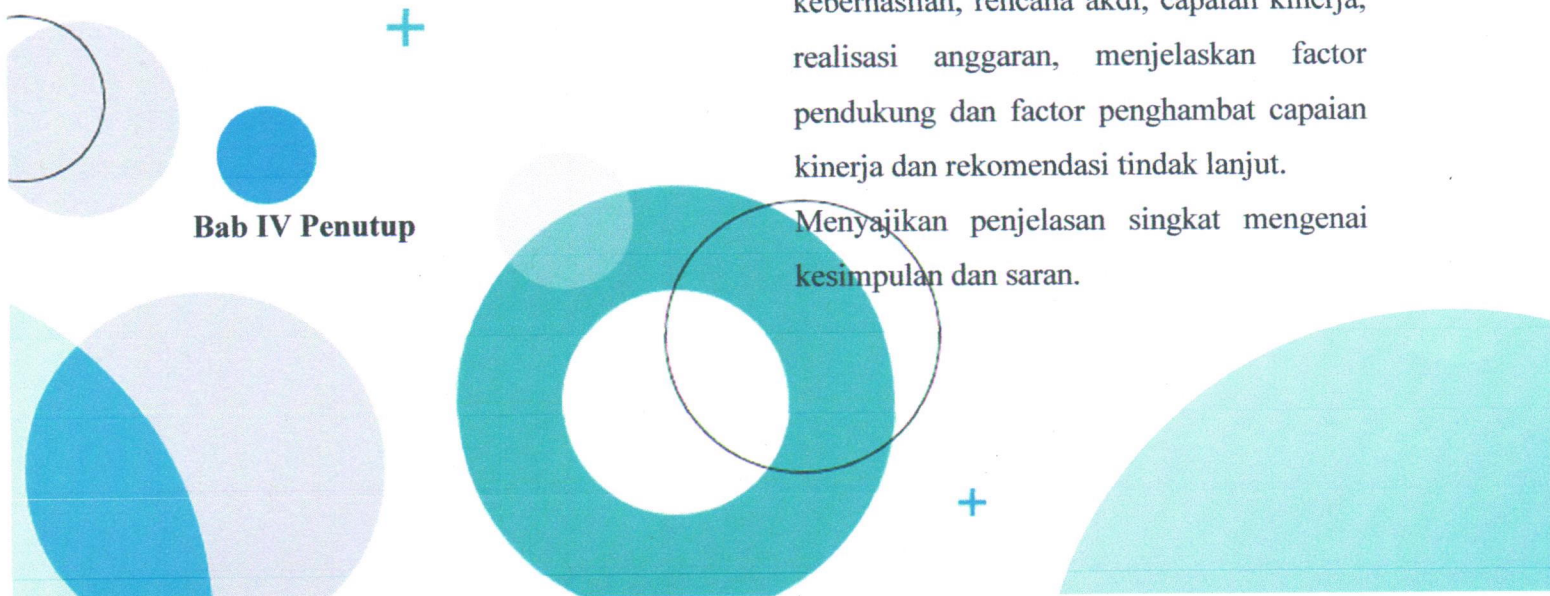
Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta 2024-2026 & Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Menggambarkan kriteria ukuran keberhasilan, rencana akdi, capaian kinerja, realisasi anggaran, menjelaskan factor pendukung dan factor penghambat capaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut.

Bab IV Penutup

Menyajikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan renstra telah mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang tatakelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi ini mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta istimewa dalam nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif konstektual mewujudkan purwakarta istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta maka sesuai tugas pokok dan fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memberikan kontribusi terhadap 1 misi dari 5 misi yang telah ditetapkan, yaitu:

Misi 1: "Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah"

Misi 5: "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat"

Tujuan dari Rencana Strategis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur;
2. Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel.

Adapun sasaran dari Rencana Strategis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pegawai;

2. meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Optimalisasi penerapan sistem merit.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode renstra telah ditetapkan, tentang penetapan indikator kinerja utama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Tabel 2.1:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
2.	Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
3.			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
4.		Sasaran 3 : Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Baik	Baik

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik

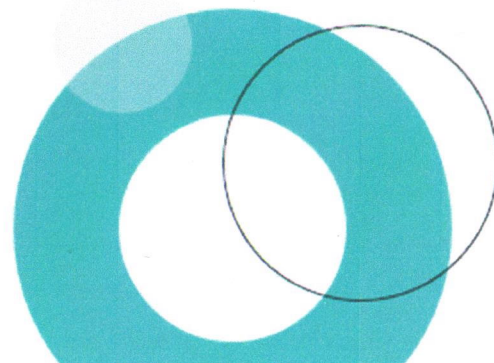
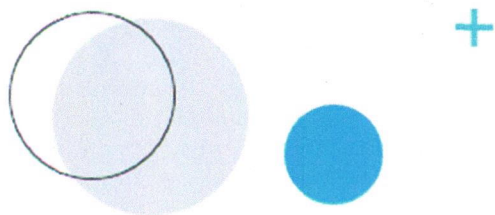
Tabel 2.3

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Yang Menunjang Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	persen	25
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,00
					3. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	51,01
					4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	2,86
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	A Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan							

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
2. yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Program Kepegawaian Daerah	6. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	80,88
					7. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	16,99
					8. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	49,80
					9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34
					10. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	172

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
					11. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	504
					12. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	persen	0,29
					13. Persentase Pemberhentian ASN	persen	5,73
					14. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	persen	2,15
					15. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	persen	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Indikator kinerja adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Indikator ini sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga individu. Dengan adanya indikator kinerja, dapat mengukur keberhasilan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja yang diukur terdiri dari:

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU): merupakan indikator yang paling penting dan strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi. iku biasanya berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai.
- B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis suatu organisasi. IKK ini seperti kompas yang memandu organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU. IKK lebih spesifik dan terukur dibandingkan IKU.
- C. Indikator Kinerja Individu (IKI): merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja individu dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun rencana aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN					
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan					
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural					
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis					
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis						
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi ASN				
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten					
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah					
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah					
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah					
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai					
		Persentase Pemberhentian ASN					
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa					
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai					

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	6	7	8	9	10	
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Pengadaan PNS dan PPPK					
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN					
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN							
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Memproses bahan usulan kenaikan pangkat ASN					
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Mengelola pengembangan karir dan promosi bagi ASN					
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN							
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP					
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Melaksanakan Pengelolaan Assessment Center					
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Memfasilitasi bantuan keuangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar					
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Melaksanakan pembinaan terhadap ASN Fungsional					
2.1.3.6	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Memfasilitasi Uji kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional					
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Melaksanakan evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional					
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Melaksanakan penyelenggaraan seleksi PNS berprestasi					
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Melaksanakan sosialisasi E-Kinerja dan netralitas ASN					
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Memproses dan menyelesaikan ASN yang terkena pelanggaran disiplin					
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat						
3.1	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah						
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan							

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	6	7	8	9	10
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Renstra, Renja murni dan renja perubahan				
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA				
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA				
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP				
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan				
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
3.1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melaksanakan koordinasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
3.1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
3.1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi / Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
3.1.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ASN				
3.1.3.5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Melaksanakan Pengadaan Mebel				
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	6	7	8	9	10	
3.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga					
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menyediakan Bahan Logistik Kantor					
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan					
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Menyediakan Bahan/Material					
3.1.8.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi Kunjungan Tamu					
3.1.8.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	6	7	8	9	10
3.1.8.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
3.1.8.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melaksanakan pengadaan /pengembangan aplikasi dan Sistem				

3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun hasil capaian Rencana Aksi kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan II tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	4.102.688.300	Tinggi	327.080.000	100%	7,97%
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Jam		-		0%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1%		2,4%		242%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	51,01%		-		0%	
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	2,86%		-		0%	
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis			1.282.598.300		276.080.000		21,53%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	287 Orang	1.282.598.300	10 Orang	276.080.000	3,4%	21,53%
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2.820.090.000		51.000.000		1,81%
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.820.090.000	-	51.000.000	0%	1,81%
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Predikat "Baik"	5.386.515.600	-	1.249.442.055	0%	23,20%
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,88%		85,77%		106%	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,99%		18,97%		112%	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49,80%		62,12%		125%	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 Orang		29 orang		85,29%	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	172 Orang		171 Orang		99,41%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	504 Orang		520 Orang		103%	
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,29%		0,013%			
		Persentase Pemberhentian ASN	5,73%		2%		42%	
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2,15%		0%		0%	
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	100%		0%		0%	
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.540.906.000		577.556.641		37,48%
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.000.050.000	1 Dokumen	366.964.941	0%	36,69%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen	225.500.000	193 Dokumen	97.414.600	53,60%	43,20%
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	132.356.000	-	55.577.100	0%	41,99%
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	183.000.000	-	57.600.000	0%	31,48%
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN			1.937.860.000		215.410.664		11,12%
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen	190.000.000	4 Dokumen	14.970.000	80%	7,88%
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.747.860.000	1 Dokumen	200.440.664	10%	11,47%
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN			1.286.500.000		244.513.450		19,01%
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	305.000.000	102 Orang	119.927.250	68%	39,32%
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	310.250.000	1 Dokumen	112.586.200	100%	36,29%
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	205.000.000	-	12.000.000	0%	5,85%
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	66.250.000	-	-	0%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60 Orang	75.000.000	-	-	0%	0,00%
2.1.3.6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25 Orang	250.000.000		12.302.750 -	0%	0,00%
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75.000.000	-	-	0%	0,00%
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			621.249.600		211.961.300		34,12%
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	173.750.000	-	30.615.500	0%	17,62%
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	347.499.600	100 Orang	149.842.100	0% 100%	43,12%
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	31.503.700	100%	31,50%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Predikat A 2. Baik	29.128.325.618		7.403.293.450		25,42%
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat "A"	29.128.325.618	Predikat "A"	7.403.293.450	100%	25,42%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.776.000		15.870.901		11,19%
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46.697.700	-	2.414.650	0%	5,17%
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.070.700	-	3.456.000	0%	20,25%
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.297.100	-	-	0%	0,00%
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.201.000	1 Laporan	5.906.751	100%	29,24%
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43.509.500	2 Laporan	4.093.500	50%	9,41%
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.377.121.438		6.043.108.128		23,81%
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.305.600	1 Laporan	4.155.600	100%	27,15%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	25.327.115.238	57 Orang/bulan	6.036.531.328	45,50%	23,83%
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	14.947.200	-	-	0%	0,00%
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	19.753.400	2 Laporan	2.421.200	50%	12,26%
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			173.746.200		41.247.500		23,74%
3.1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	14.812.300	-	-	0%	0,00%
3.1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.330.000	-	5.000.000	0%	27,28%
3.1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	39.536.900	-	-	0%	0,00%
3.1.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	40.000.000	-	-	0%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.3.5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	61.067.000	1 Paket	36.247.500	100%	59,36%
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278.820.150		198.661.200		71,25%
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit	198.766.200	85 Unit	198.661.200	99,99%	100,00%
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	44.113.950	-	-	0%	0,00%
3.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.940.000	1 Unit	35.940.000	100%	100,00%
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.618.548.180		588.834.375		36,38%
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	4.000.000	100%	66,67%
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	411.286.672	4 Laporan	82.137.566	49,80%	19,97%
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.201.261.508	7 Laporan	502.696.809	53,80%	41,85%
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			424.220.000		30.358.400		7,16%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	-	-	0%	0,00%
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40 Unit	29.660.000	40 Unit	25.860.000	100%	87,19%
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134.800.000	4 Unit	4.498.400	18,18%	3,34%
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	59.760.000	-	-	0%	0,00%
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14.950.400		4.330.000		28,96%
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.950.400	1 Dokumen	4.330.000	100%	28,96%
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.099.143.250		480.882.946		43,75%
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.829.000	1 Paket	29.912.000	100%	50,00%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6 Paket	188.019.850	6 Paket	187.403.850	100%	99,67%
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.738.000	1 Paket	30.738.000	100%	100,00%
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	1 Paket	69.667.000	50%	46,44%
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	95.854.400	-	-	0%	0,00%
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	159.702.000	1 Paket	79.841.000	50%	49,99%
3.1.8.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000	6 Paket	-	49,80%	0,00%
3.1.8.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000	6 Paket	83.321.096	49,80%	49,01%
3.1.8.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35.000.000	-	-	0%	0,00%
3.1.8.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	150.000.000	-	-	0%	0,00%

3.3.1 Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalitas Pegawai

Sasaran meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai diukur menggunakan capaian kategori Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) dengan target **“Sangat Rendah”** atau **“51-60”** dengan realisasi **“Tinggi”** atau **“89,09”**. Hal disebabkan telah dilaksanakan update data kepegawaian, baik itu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Program pada Sasaran Strategis ini adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 pada program ini adalah persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target **1%** dan realisasi sebesar **2,4%** atau **“Melampaui”**, hal ini disebabkan banyaknya ASN yang mengikuti beasiswa, mengurus ijin Belajar serta mengurus Surat keterangan Belajar dengan target 70 orang dan realisasi 193 orang. Adapun untuk indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis belum ada realisasi sampai dengan triwulan II ini.

LISTING NILAI IP ASN TAHUN 2023
UPDATE DATA 14 MEI 2024

Nama Instansi	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Rata Nilai	Jumlah PNS	Kategori
Pemerintah Kab. Majalengka	20.35	39.11	26.29	5	90.75	8,614	tinggi
Pemerintah Kab. Purwakarta	20.11	38.73	25.25	5	89.09	6,237	tinggi
Pemerintah Kab. Tangerang	20.31	37.94	24.8	5	88.05	9,769	tinggi
Pemerintah Kab. Indramayu	20.23	35.7	24.21	5	85.14	9,242	tinggi
Pemerintah Kab. Serang	20.34	34.23	24.81	5	84.38	8,181	tinggi
Pemerintah Kab. Sumedang	20.27	32.23	25.21	5	82.7	7,479	tinggi
Pemerintah Kab. Bogor	20.49	27.11	25.54	5	78.14	12,906	sedang

Gambar 3.1 Capaian IPASN

3.3.2 Optimalisasi Penerapan Sistem Merit

Sasaran meningkatnya optimalisasi penerapan sistem merit diukur menggunakan capaian indeks Sistem Merit dengan target predikat **“Baik”**. Program pada Sasaran Strategis ini adalah Program Kepegawaian Daerah. Adapun indikatornya antara lain:

Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (pns tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan target 80,88% dan realisasi di Triwulan I tahun 2024 sebesar 85,77%, hal ini disebabkan karena banyaknya ASN yang melaksanakan penyesuaian pendidikan setelah lulus pelaksanaan UPKP yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024.

-
- Rasio pegawai fungsional (%) (pns tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan target 16,99% dan realisasi di Triwulan I tahun 2024 sebesar 18,97%.
- Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (pns tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan target 49.80% dan realisasi di Triwulan II tahun 2024 sebesar 62,12% hal ini dikarenakan telah dilantiknya PPPK tahun 2023 sebanyak 62 orang.
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah dengan target terisi 34 orang dan di Triwulan II tahun 2024 terisi sebanyak 29 orang. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *assesment* JPT akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.
- Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dengan target terisi 172 orang dan di Triwulan II tahun 2024 terisi sebanyak 171 orang.
- Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dengan target terisi 504 orang dan di Triwulan II tahun 2024 terisi sebanyak 520 orang.
- Persentase pemberhentian ASN dengan target 5,73% dan realisasi di Triwulan I tahun 2024 sebesar 2% atau 193 orang yang pensiun.



Gambar 3.2 Pelantikan & Pengambilan Janji/Sumpah
P P P K Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023



Gambar 3.3 Bimtek Pengelolaan Kinerja ASN



Gambar 3.4 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Periode Semester I Tahun 2024



Gambar 3.5 Pelaksanaan Assesment Pegawai

3.3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur menggunakan 2 indikator, antara lain:

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat “**Memuaskan**” atau Kategori “**A**”, dengan realisasi predikat “Memuaskan” pada kategori “A” dan nilai 84,40.
- Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan II tahun 2024 adalah 88,58 atau “**Sangat Baik**”.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp. 38.617.529.518,00-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 9.015.755.505,00- atau sebesar 23,35%. Kecilnya persentase penyerapan anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta sampai dengan triwulan II tahun 2024 disebabkan adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan dan sebagian besar kegiatan kontraktual masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum ada realisasi pembayaran untuk kegiatan tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.128.325.618,00- dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 7.437.233.450,00- atau 25,53% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 21.691.092.168,00-.
2. **Program Kepegawaian Daerah**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.386.515.600 dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 Rp. 1.249.442.055 atau 23,20% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 4.137.073.545,00-.
3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.102.688.300,00- dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 327.080.000,00- atau 7,97% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 3.775.608.300,00-.

3.5 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

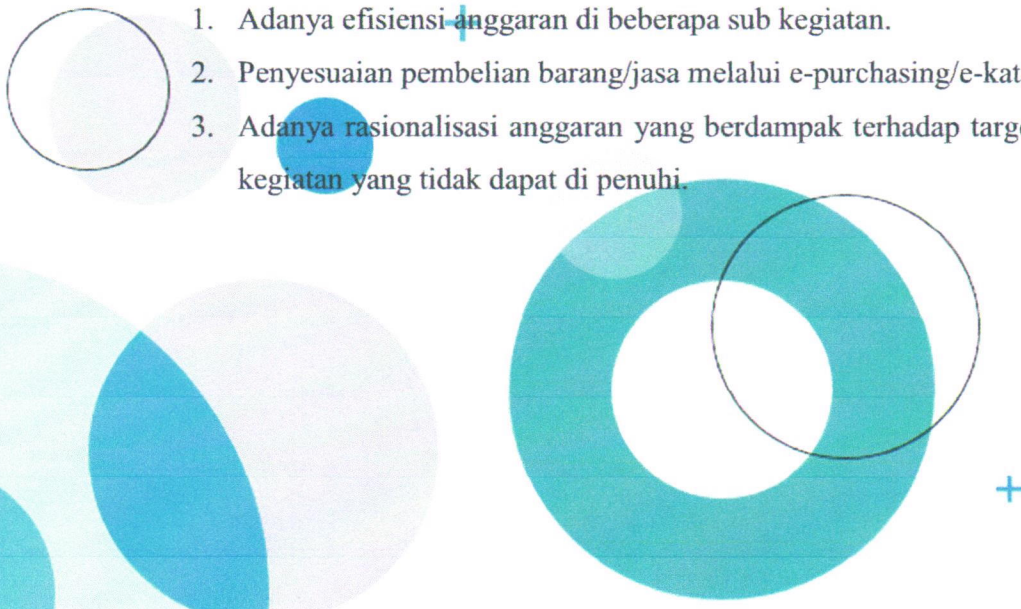
Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

Koordinasi yang baik antara bidang dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh sekretariat dalam hal ini sub bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renja dan dalam hal pengawalan target anggaran program/kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

B. Faktor Penghambat

1. Adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan.
2. Penyesuaian pembelian barang/jasa melalui e-purchasing/e-katalog.
3. Adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak terhadap target kinerja beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di penuhi.



3.6 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/faktor penghambat yang masih ditemui, maka perlu dilakukannya langkah-langkah antara lain:

a. Evaluasi Kembali Efisiensi Anggaran:

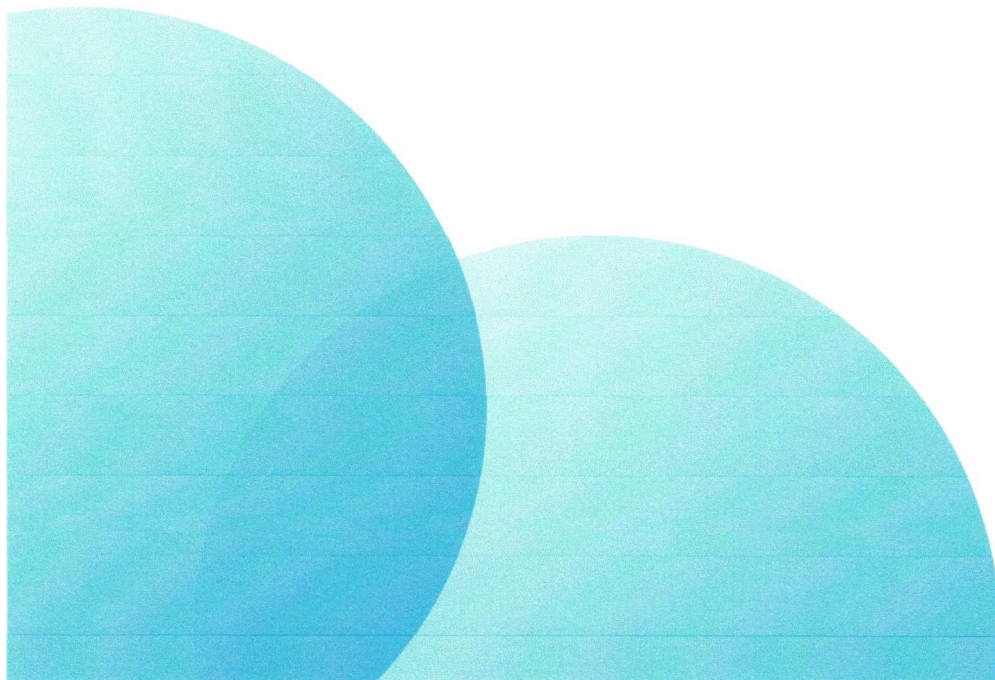
- Lakukan analisis mendalam terhadap setiap sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Identifikasi apakah efisiensi ini memang memberikan dampak positif terhadap pencapaian target atau justru menghambatnya.
- Jika efisiensi anggaran menghambat pencapaian target, prioritaskan kembali alokasi anggaran. Fokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian tujuan.

b. Optimalkan Penggunaan E-purchasing/e-katalog:

- Pastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli melalui e-purchasing/e-katalog sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Lakukan evaluasi terhadap vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Pastikan vendor tersebut memiliki kualitas produk/jasa yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan.

c. Atasi Dampak Rasionalisasi Anggaran:

- Identifikasi sub kegiatan yang sangat terdampak oleh rasionalisasi anggaran dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target.
- Pertimbangkan untuk merevisi target kinerja sub kegiatan yang terdampak. Pastikan revisi target tetap realistis dan sejalan dengan tujuan strategis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan telah tercapai, seperti capaian Indeks Profesionalitas ASN mencapai target “Tinggi”, Capaian SAKIP dengan predikat “A” dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan perolehan predikat “Sangat Baik”.

Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk triwulan II tahun 2024, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. 9.015.755.505,00- (25,53%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 38.617.529.518,00-.

4.2 Saran

Dalam upaya menjaga konsistensi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka BKPSDM Kabupaten Purwakarta merumuskan beberapa strategi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk saran melaksanakan evaluasi kembali atas Efisiensi Anggaran, Optimalkan Penggunaan E-purchasing/e-katalog dan Atasi Dampak Rasionalisasi Anggaran.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Lakukan analisis mendalam terhadap setiap sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Identifikasi apakah efisiensi ini memang memberikan dampak positif terhadap pencapaian target atau justru menghambatnya.
- b. Jika efisiensi anggaran menghambat pencapaian target, prioritaskan kembali alokasi anggaran. Fokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian tujuan.
- c. Pastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli melalui e-purchasing/e-katalog sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
- d. Pertimbangkan untuk merevisi target kinerja sub kegiatan yang terdampak. Pastikan revisi target tetap realistis dan sejalan dengan tujuan strategis.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, Anggaran dan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024
Hari/Tanggal : Senin / 22 Juli 2024
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Peserta Rapat

Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Moderator : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Bidang
2. Ketua Tim Kerja

Kegiatan Rapat:

1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan baik anggaran maupun kinerja yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2024 serta mitigasi risiko yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.
2. Pembahasan :
 - a. Laporan realisasi pada triwulan II Tahun 2024 penyerapan dana masih kecil yaitu Rp. 9.015.755.505,00- atau 25,53% dari pagu anggaran Rp. 38.617.529.518,00-. Kecilnya persentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II disebabkan adanya refocusing anggaran.
 - b. Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan II tahun 2024. Dari 3 rencana pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada triwulan II tahun 2024, semuanya telah terealisasi seperti sosialisasi ASN berAHKLAK, pelaksanaan *coaching clinic* penyusunan SKP di aplikasi e-kinerja, rekonsiliasi *database* yang ada di BKPSDM Kabupaten Purwakarta dengan BKAD BKPSDM Kabupaten Purwakarta dan melaksanakan MOU dengan ITB sebagai lembaga yang terakreditasi pelaksana Ujian Dinas dan Penyetaraan ijazah.

- c. Masing-masing kepala bidang memaparkan capaian kinerja dan anggarannya serta langkah mitigasi risiko yang akan dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2024.
- d. Kepala Badan menanyakan perihal hasil seleksi kompetensi JPT untuk RSUD Bayu Asih dan persiapan pelaksanaan mutasi dan promosi..
- e. Kepala Bidang Pembinaan menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penilaian Pegawai berprestasi akan dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2024.

Dokumentasi :





Notulis

Handwritten signature

DEWI PROKLAMASI, SE, MM
NIP. 19770817 200901 2 002

REALISASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN		Sangat Rendah	4.102.688.300	Tinggi	327.080.000	100%	7,97%
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25 Jam		-		0%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		1%		2,4%		242%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		51,01%		-		0%	
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis		2,86%		-		0%	
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis				1.282.598.300		276.080.000		21,53%
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi ASN	287 Orang	1.282.598.300	10 Orang	276.080.000	3,4%	21,53%
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.820.090.000		51.000.000		1,81%
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.820.090.000	-	51.000.000	0%	1,81%
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten		Predikat "Baik"	5.386.515.600	-	1.249.442.055	0%	23,20%
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		80,88%		85,77%		106%	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		16,99%		18,97%		112%	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		49,80%		62,12%		125%	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		34 Orang		29 orang		85,29%	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		172 Orang		171 Orang		99,41%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		504 Orang		520 Orang		103%	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,29%		0,013%			
		Persentase Pemberhentian ASN		5,73%		2%		42%	
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa		2,15%		0%		0%	
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai		100%		0%		0%	
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi				1.540.906.000		577.556.641		37,48%
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.000.050.000	1 Dokumen	366.964.941	0%	36,69%
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	360 Dokumen	225.500.000	193 Dokumen	97.414.600	53,60%	43,20%
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	132.356.000	-	55.577.100	0%	41,99%
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	183.000.000	-	57.600.000	0%	31,48%
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN				1.937.860.000		215.410.664		11,12%
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Memproses bahan usulan kenaikan pangkat ASN	5 Dokumen	190.000.000	4 Dokumen	14.970.000	80%	7,88%
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Mengelola pengembangan karir dan promosi bagi ASN	1 Dokumen	1.747.860.000	1 Dokumen	200.440.664	10%	11,47%
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN				1.286.500.000		244.513.450		19,01%
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP	150 Orang	305.000.000	102 Orang	119.927.250	68%	39,32%
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Melaksanakan Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	310.250.000	1 Dokumen	112.586.200	100%	36,29%
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Menfasilitasi bantuan keuangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar	5 Orang	205.000.000	-	12.000.000	0%	5,85%
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	66.250.000	-	-	0%	0,00%
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Melaksanakan pembinaan terhadap ASN Fungsional	60 Orang	75.000.000	-	-	0%	0,00%
2.1.3.6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Menfasilitasi Uji kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional	25 Orang	250.000.000		-	0%	0,00%
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Melaksanakan evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75.000.000	-	-	0%	0,00%
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				621.249.600		211.961.300		34,12%
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Melaksanakan penyelenggaraan seleksi PNS berprestasi	1 Laporan	173.750.000	-	30.615.500	0%	17,62%
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Melaksanakan sosialisasi E-Kinerja dan netralitas ASN	100 Orang	347.499.600	100 Orang	149.842.100	100%	43,12%
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Memproses dan menyelesaikan ASN yang terkena pelanggaran disiplin	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	31.503.700	100%	31,50%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			29.128.325.618		7.403.293.450		25,42%
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Predikat "A"	29.128.325.618	Predikat "A"	7.403.293.450	100%	25,42%
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				141.776.000		15.870.901		11,19%
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Renstra, Renja murni dan renja perubahan	3 Dokumen	46.697.700	-	2.414.650	0%	5,17%
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	1 Dokumen	17.070.700	-	3.456.000	0%	20,25%
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	14.297.100	-	-	0%	0,00%
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	1 Laporan	20.201.000	1 Laporan	5.906.751	100%	29,24%
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43.509.500	2 Laporan	4.093.500	50%	9,41%
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.377.121.438		6.043.108.128		23,81%
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	15.305.600	1 Laporan	4.155.600	100%	27,15%
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan	63 Orang/Bulan	25.327.115.238	57 Orang/bula	6.036.531.328	45,50%	23,83%
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	14.947.200	-	-	0%	0,00%
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	19.753.400	2 Laporan	2.421.200	50%	12,26%
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				173.746.200		41.247.500		23,74%
3.1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melaksanakan koordinasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	14.812.300	-	-	0%	0,00%
3.1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.330.000	-	5.000.000	0%	27,28%
3.1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi / Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	39.536.900	-	-	0%	0,00%
3.1.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ASN	25 Orang	40.000.000	-	-	0%	0,00%
3.1.3.5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	61.067.000	1 Paket	36.247.500	100%	59,36%

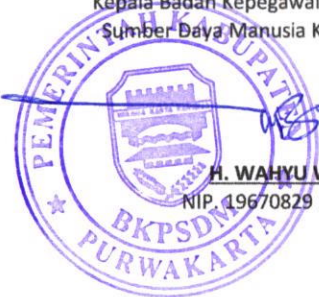
NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				278.820.150		198.661.200		71,25%
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Melaksanakan Pengadaan Mebel	85 Unit	198.766.200	85 Unit	198.661.200	99,99%	100,00%
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	44.113.950	-	-	0%	0,00%
3.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.940.000	1 Unit	35.940.000	100%	100,00%
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.618.548.180		588.834.375		36,38%
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	4.000.000	100%	66,67%
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	411.286.672	4 Laporan	82.137.566	49,80%	19,97%
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	1.201.261.508	7 Laporan	502.696.809	53,80%	41,85%
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				424.220.000		30.358.400		7,16%
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	-	-	0%	0,00%
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	29.660.000	40 Unit	25.860.000	100%	87,19%
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Melaksanakan pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	134.800.000	4 Unit	4.498.400	18,18%	3,34%
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85 Unit	59.760.000	-	-	0%	0,00%
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat				14.950.400		4.330.000		28,96%
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.950.400	1 Dokumen	4.330.000	100%	28,96%
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.099.143.250		480.882.946		43,75%
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	59.829.000	1 Paket	29.912.000	100%	50,00%
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	188.019.850	6 Paket	187.403.850	100%	99,67%
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.738.000	1 Paket	30.738.000	100%	100,00%
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	150.000.000	1 Paket	69.667.000	50%	46,44%
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	95.854.400	-	-	0%	0,00%
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Menyediakan Bahan/Material	2 Paket	159.702.000	1 Paket	79.841.000	50%	49,99%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		% REALISASI	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9
3.1.8.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000	6 Paket	-	49,80%	0,00%
3.1.8.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000	6 Paket	83.321.096	49,80%	49,01%
3.1.8.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35.000.000	-	-	0%	0,00%
3.1.8.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melaksanakan pengadaan /pengembangan aplikasi dan Sistem	3 Dokumen	150.000.000	-	-	0%	0,00%

Purwakarta, 22 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001